

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah elemen yang tak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Pendidikan diartikan sebagai bentuk usaha dalam memanusiakan manusia (Agistiani, 2023), sebuah konsep yang menekankan pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi individu secara menyeluruh, mencakup dimensi intelektual, emosional, moral, dan sosial sebagai satu kesatuan. Dijelaskna dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan pada pasal 1 ayat (1) adalah

"usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."

Definisi ini menekankan bahwa pendidikan tak semata mata fokus pada aspek akademik saja, namun pengembangan karakter dan keterampilan juga menjadi salah satu aspek yang nantinya dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Bagi sebuah bangsa, keberadaan manusia yang berpendidikan memiliki peran vital dalam kemajuan dan kesejahteraannya. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kecerdasan kolektif bangsa, mendorong peningkatan taraf

hidup masyarakat, serta memperkuat harkat dan martabat nasional (Aplian *et al.* 2019). Dengan demikian, setiap individu perlu memiliki kesempatan dan kemampuan dalam mengakses Pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi yang mana mmebuat salah satu usaha dalam melakukan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia.

Sejatinnya, masing masing warga negara memiliki suatu hak untuk dapat mengakses Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam mencapai potensi terbaik mereka, terutama dalam menghadapi tantangan era modern. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Hak-hak tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pribadi sekaligus mewujudkan kesejahteraan seluruh umat manusia. Berdasarkan hal ini, warga negara Indonesia memiliki hak untuk dapat memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong peningkatan kualitas kehidupan.

Selain itu, dalam UUD 1945 Pasal 31 dijelaskan bahwa *"Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi"*. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan menjamin pemerataan serta keadilan dalam akses pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat. Hal ini diperkuat dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

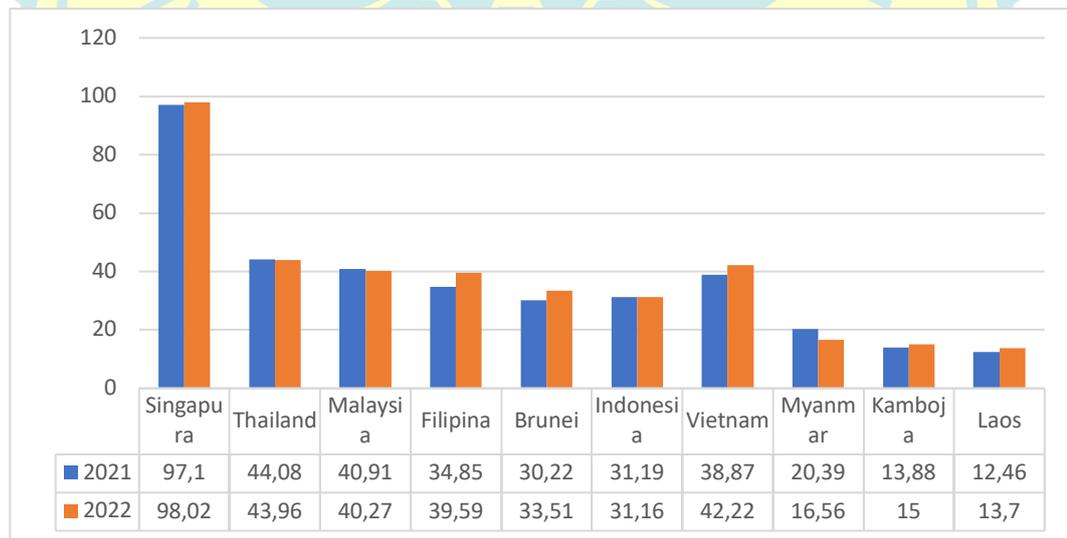
Tinggi, yang menegaskan *“Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menjamin pemerataan dan perluasan akses serta menjamin mutu”*. Selanjutnya, dalam Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa *“Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu, dalam memperoleh akses terhadap pendidikan tinggi”*.

Namun, realitas di Indonesia sepenuhnya belum sesuai dengan apa yang telah dimuat dalam undang – undang (Yanti et al., 2023). Hal ini tercermin dari rendahnya angka partisipasi kasar khususnya dalam jenjang perguruan tinggi dibandingkan tingkat pendidikan yang lain. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pendidikan menunjukkan seberapa besar kontribusi pemerintah dalam memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan (Habibah et al., 2019).

Angka partisipasi kasar sendiri dapat di definisikan sebagai sebuah parameter paling sederhana untuk mengukur jumlah partisipasi penduduk dalam pendidikan secara umum di suatu tingkat pendidikan. Bersamaan dengan Angka Partisipasi Murni (APM), APK menjadi salah satu indikator penilaian dalam pendidikan bermutu. Dengan meningkatnya pendidikan berkualitas dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat pada setiap jenjang yang ada dengan menjamin pada kualitas pendidikan yang inklusif dan merata (Naharin et al., 2023).

APK PT PK PT dianggap penting untuk diketahui karena Pendidikan tinggi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengembangan kualitas sumber

daya penduduk suatu negara, yang menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Partisipasi pada Perguruan Tinggi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai seberapa banyak penduduk yang dapat mengakses pendidikan tinggi (Juliansyah et al., 2024). Jika APK PT suatu negara masih rendah, maka potensi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan daya saing negara di tingkat global akan terbatas. Safira & Wibowo (2021) menjelaskan bahwa tingginya besaran APK PT mencerminkan semakin banyak individu yang memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi. Ketika besaran APK mendekati atau bahkan melebihi 100%, ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menyediakan layanan pendidikan tinggi yang memadai untuk seluruh penduduk usia pada suatu jenjang. Tingginya APK mencerminkan mudahnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja.

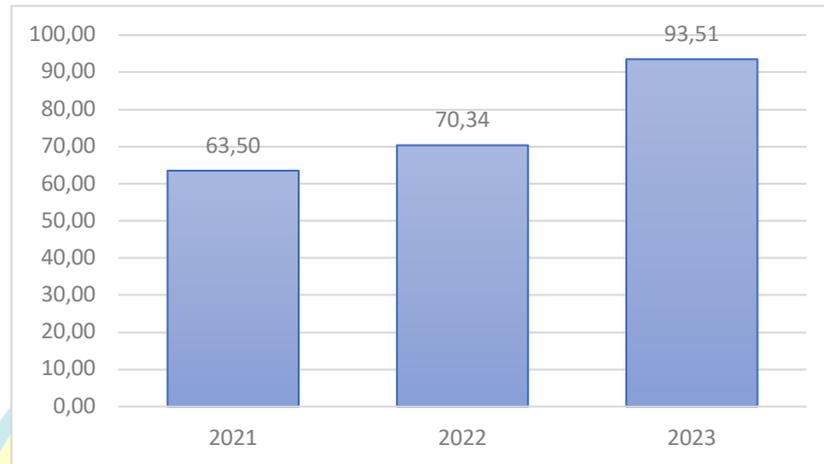


Gambar 1. 1 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di ASEAN (dalam persen)

Sumber : *World Bank, The Global Economy*, dan BPS, 2023, diolah oleh penulis

Hingga saat ini, APK PT di Indonesia masih berada pada kisaran 31%. Pemerintah sendiri menargetkan kenaikan APK pada tahun 2024 sebesar 37%. Berdasarkan pemaparan yang telah dimuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) memperlihatkan bahwa APK PT menjadi capaian terendah dibandingkan dengan APK pada jenjang pendidikan lainnya. Sebagai perbandingan, APK jenjang SD mencapai 106,4%, SMP sebesar 87,7%, dan SMA sebesar 80,17%. Pada tahun 2021, APK PT mencapai 31,19%, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 31,16% pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan salah satu tantangan signifikan, terutama jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya yang cenderung lebih stabil.

Nilai APK pada Perguruan Tinggi Indonesia masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan nilai standar APK PT dunia yang berada pada angka 40,45%. Bahkan, posisi Indonesia masih jauh dibelakang apabila dilihat dengan negara lain yang ada di ASEAN, seperti Singapura yang pada tahun 2022 mencapai angka 98%, Thailand berada diangka 43,96%, dan Malaysia dengan APK sebesar 40,27%. Tingginya kesenjangan ini menunjukkan bahwa capaian APK pendidikan tinggi di Indonesia belum dapat mencapai tujuan yang sebelumnya telah dicanangkan. Lebih dari itu, pada tahun 2022, angka ini justru mengalami penurunan, yang ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut kemungkinan mencakup pendapatan per kapita, alokasi belanja pendidikan serta rasio jumlah perguruan tinggi berbagai provinsi di Indonesia.



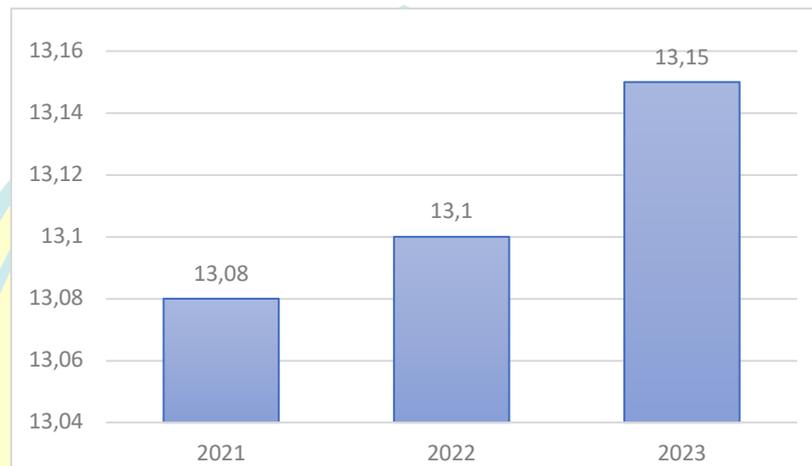
Gambar 1. 2 Grafik Pendapatan Perkapita Indonesia (Dalam Juta Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS, 2023), diolah oleh penulis

Data pada gambar 1.2 menunjukkan Pendapatan Perkapita Indonesia mengalami tren peningkatan signifikan, Pada tahun 2021, pendapatan per kapita tercatat sebesar Rp63.500.000 dan meningkat signifikan hingga mencapai Rp93.510.000 pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi nasional yang semestinya dapat mendorong peningkatan partisipasi pendidikan tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan belum diiringi dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar pada jenjang perguruan tinggi secara signifikan. Hal ini menandakan bahwa meskipun masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi, tidak semua peningkatan pendapatan dialokasikan untuk pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Artinya, ada kemungkinan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan lain dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Besar kecilnya pendapatan masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan kesempatan anak dalam mengakses pendidikan tinggi karena

berkaitan dengan ketersediaan biaya pendidikan dalam keluarga. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, keluarga dapat menganggarkan lebih banyak sumber daya untuk pendidikan, sehingga meningkatkan rata-rata lama sekolah.



Gambar 1. 3 Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (dalam tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS, 2023), diolah oleh penulis.

Angka harapan lama sekolah (HLS) Indonesia menunjukkan tren kenaikan dari 13,08 tahun pada 2021 menjadi 13,15 tahun pada 2023. Walaupun peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses pendidikan secara umum, kenaikannya masih sangat lambat dan belum mampu mendorong lonjakan APK di tingkat perguruan tinggi. Angka HLS yang hanya naik 0,07 tahun selama tiga tahun mencerminkan bahwa masyarakat masih banyak yang berhenti di tingkat pendidikan menengah, sehingga potensi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi tetap rendah. Rendahnya HLS ini memperkuat asumsi bahwa hambatan dalam keberlanjutan pendidikan berkontribusi terhadap stagnasi APK perguruan tinggi di Indonesia.

Angka harapan lama sekolah yang lebih tinggi mencerminkan potensi pendidikan yang membaik, tetapi realisasi partisipasi di tingkat pendidikan tinggi tetap membutuhkan dukungan kebijakan yang merata dan inklusif.



Gambar 1. 4 Grafik Belanja Pendidikan (dalam miliar rupiah)

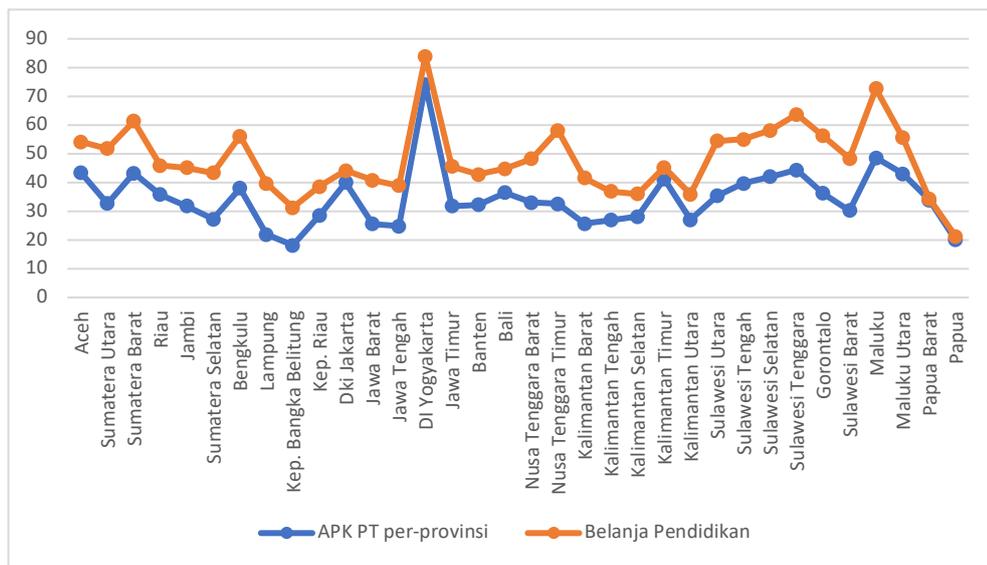
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), diolah oleh peneliti

Selain pendapatan, faktor belanja pemerintah pada sektor pendidikan juga memberikan efek yang kuat terhadap capaian APK pendidikan tinggi. Data menunjukkan bahwa belanja pendidikan mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022, yaitu dari Rp175.236,50 menjadi Rp169.230,40. Penurunan ini bisa berdampak pada berkurangnya program bantuan pendidikan, beasiswa, dan subsidi biaya kuliah yang sangat diperlukan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk melanjutkan studi. Meskipun pada tahun 2023 belanja pendidikan naik menjadi Rp230.728,40, jumlah tersebut belum merata dirasakan oleh seluruh wilayah di Indonesia. Ketimpangan dalam distribusi anggaran pendidikan antar daerah menyebabkan Masih terdapat sejumlah wilayah tertinggal yang belum memiliki kapasitas memadai dalam penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan tinggi yang memadai.

Ketidakseimbangan ini secara langsung mempengaruhi upaya peningkatan APK pendidikan tinggi di Indonesia. Kenaikan pendapatan per kapita dan angka harapan hidup yang tidak sejalan dengan peningkatan akses pendidikan, serta fluktuasi belanja pendidikan, menunjukkan bahwa faktor ekonomi saja belum cukup untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Ketidakmerataan belanja pendidikan juga memperparah kesenjangan akses, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), di mana fasilitas pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa selain faktor pendapatan dan belanja pemerintah, ketersediaan lembaga pendidikan tinggi yang memadai dan terjangkau menjadi elemen kunci dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di Indonesia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi secara rinci dampak dari variabel ekonomi dan kebijakan anggaran terhadap perubahan APK pendidikan tinggi dari tahun ke tahun.

Intelligentia - Dignitas



Gambar 1. 5 Grafik APK PT dan Belanja Pemerintah per-provinsi tahun 2023

Sumber : BPS dan Pusadatin Kemendikdasmen, 2023, diolah oleh peneliti

Pada Grafik 1.5, dapat dilihat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi tertinggi pada tahun 2023, yaitu 74,08%, dengan alokasi Belanja Pendidikan sebesar 9,7%. Sebaliknya, Kepulauan Bangka Belitung memiliki APK Perguruan Tinggi terendah, hanya 18,99%, meskipun alokasi Belanja Pendidikan di provinsi ini mencapai 13,1%. Di sisi lain, di Provinsi Papua, meskipun alokasi Belanja Pendidikan hanya sebesar 1,3%, APK yang tercatat adalah 19,99%.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi Belanja Pendidikan dapat memengaruhi akses masyarakat ke pendidikan tinggi, hubungan tersebut tidak selalu konsisten, seperti yang terlihat pada beberapa kasus anomali. Contohnya, di Papua Barat, meski alokasi Belanja Pendidikan hanya sebesar 0,5%, APK di provinsi ini tetap relatif rendah, yaitu 33,89%.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bara *et al.*, (2023), Pendapatan Domestik per kapita terbukti memiliki efek yang signifikan terhadap tingkat partisipasi pendidikan tinggi, yang diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), di sejumlah provinsi di Indonesia. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan wilayah dalam hal pendapatan serta kesempatan memperoleh pendidikan di kalangan masyarakat. Dalam penelitian Aurellin & Sentosa (2023), keluarga dengan pendapatan per kapita lebih baik berpengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi dalam pendidikan tinggi. Keluarga dengan penghasilan lebih tinggi memiliki kapasitas finansial yang cenderung lebih memadai untuk mengakomodasi biaya-biaya yang terkait dengan pendidikan tinggi, sehingga memudahkan akses terhadap peluang pendidikan. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusaini *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa pendapatan yang didapatkan suatu keluarga berkontribusi secara signifikan terhadap partisipasi dalam pendidikan tinggi dalam jangka panjang. Keluarga dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah umumnya lebih memfokuskan alokasi sumber daya mereka terhadap daya beli kebutuhan dasar kehidupan, sehingga akses terhadap pendidikan menjadi terbatas. Kemudian dijelaskan oleh Yanti *et al.* (2023), Menyatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam sektor pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi. Peningkatan anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan dapat memperbaiki infrastruktur, kualitas, dan aksesibilitas pendidikan, sehingga mendorong peningkatan tingkat partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Namun, dampak pengeluaran

pemerintah dapat bervariasi tergantung pada cara alokasi dan penggunaannya, yang menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran sangat penting, efektivitasnya bergantung pada hal tersebut (Khusaini et al., 2022).

Maka, dari fenomena variabel-variabel tersebut, penulis tertarik untuk mengamati pengaruh dari pendapatan perkapita, angka harapan lama sekolah, dan pengeluaran pemerintah terhadap angka partisipasi kasar jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini berupaya memperluas cakupan dengan secara khusus menyoroti Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang perguruan tinggi, yang mencakup keseluruhan populasi usia kuliah tanpa memandang status kelulusan. Melengkapi kesenjangan penelitian sebelumnya, Fokus ini penting karena Angka Partisipasi Kasar (APK) memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai akses pendidikan tinggi, termasuk potensi ketimpangan dalam kesempatan pendidikan yang tidak terungkap pada penelitian dengan fokus Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti memutuskan untuk mengangkat topik penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Perkapita, Angka Harapan Lama Sekolah, dan Belanja Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Kasar Jenjang Perguruan Tinggi Di Indonesia”**

1.2 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas dan menjamin bahwa pelaksanaan penelitian senantiasa selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun cakupan penelitian ini ditentukan dengan batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini melibatkan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan data yang sudah dimuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta data Pendidikan Tinggi yang tersedia dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk tahun 2023.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang Pendidikan Tinggi di Indonesia dan tidak mencakup jenjang pendidikan lainnya.
3. Penelitian ini difokuskan pada perguruan tinggi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), dikarenakan ketiadaan data yang mencakup perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan merujuk pada uraian latar belakang sebelumnya, pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia?
2. Apakah belanja pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia?
3. Apakah angka harapan lama sekolah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia?

4. Apakah pendapatan perkapita, belanja pendidikan, dan angka harapan lama sekolah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menguji apakah pendapatan perkapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia.
2. Untuk menguji apakah belanja pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia.
3. Untuk menguji apakah angka harapan lama sekolah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia.
4. Untuk menguji apakah pendapatan perkapita, angka harapan lama sekolah dan belanja pendidikan secara positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat andil terhadap pengembangan teori dalam bidang ekonomi pendidikan dengan menganalisis pengaruh pendapatan perkapita, tingkat kemiskinan, dan belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap angka partisipasi kasar di perguruan tinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara faktor-faktor ekonomi

makro dan pendidikan tinggi, serta memberikan wawasan baru terkait pengaruh kebijakan publik terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Dalam segi teoritis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi akses pendidikan tinggi, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat, terutama dalam meningkatkan pendapatan perkapita dan meningkatkan anggaran pendidikan guna menciptakan akses pendidikan yang lebih luas.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mendalami topik yang relevan dalam ekonomi pendidikan, serta memperdalam analisis terkait variabel ekonomi makro yang berdampak pada sektor pendidikan tinggi. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan dalam mengolah data sekunder dan analisis statistik, serta memberikan kontribusi pada literatur yang ada mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akses pendidikan tinggi di Indonesia.

Intelligentia - Dignitas